

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu agenda utamanya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kemiskinan tetap menjadi tantangan berkelanjutan yang kompleks dan multidimensional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional masih berada pada angka 9,03% pada Maret 2024, mengindikasikan bahwa permasalahan ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti empiris (BPS Indonesia, 2025).

Provinsi Riau, sebagai salah satu wilayah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, memiliki posisi strategis dalam struktur ekonomi nasional. Nilai ekspor kelapa sawit dari provinsi ini mencapai USD 8,93 miliar pada tahun 2023. Secara normatif kontribusi ekonomi sebesar ini seharusnya mampu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Namun, data menunjukkan fenomena yang paradoks: tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pada Maret 2024 masih berada di angka 6,67% (BPS Riau, 2025). Kesenjangan antara potensi ekonomi yang besar dan capaian sosial yang belum optimal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Rokan Hulu, yang dikenal sebagai "Negeri Seribu Suluk", merepresentasikan kasus yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Wilayah ini sangat bergantung pada sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang Rp 30.985,12 miliar terhadap total PDRB kabupaten. Dari seluruh komoditas pertanian, kelapa sawit mendominasi hingga 95,94% dari total produksi perkebunan (BPS Rokan Hulu, 2025). Tingkat ketergantungan yang ekstrem ini menjadikan dinamika sektor kelapa sawit sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Meskipun kelapa sawit sering disebut sebagai “emas hijau” dan menjadi motor utama perekonomian Kabupaten Rokan Hulu, kondisi sosial ekonomi masyarakat justru memperlihatkan adanya paradoks. Produksi kelapa sawit terus meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di daerah ini masih mencapai 9,62%, (BPS Rokan Hulu, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis sawit belum secara merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, meskipun sektor sawit memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah, Terdapat indikasi bahwa aliran manfaat ekonomi belum berjalan optimal, sehingga sebagian masyarakat masih belum terangkat dari kemiskinan.

Menghadapi paradoks pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai instrumen alternatif untuk mendorong pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini di rancang untuk menjaga kesejahteraan pekerja di sektor formal dan mendorong penurunan kemiskinan melalui pendapatan rumah tangga. Tabel 1 menunjukkan bahwa UMK di Rokan Hulu meningkat secara konsisten sebesar 74,6% selama periode 2015–2024, dari Rp 1.925.000 menjadi Rp 3.361.000.

Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Dinamika kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu peneliti menyajikan data perkembangan ketiga variabel utama periode 2015–2024:

Tabel 1. Perkembangan Presentasi Kemiskinan, Produksi Kelapa Sawit Rakyat, dan UMK di Kabupaten Rokan Hulu (2015-2024)

Tahun	Presentasi Penduduk Miskin rokan hulu (%)	produksi kelapa sawit rakyat rokan hulu (ton)	UMK Rokan Hulu (Rp)
2015	11,05	647500.8	1.925.000,00
2016	11,05	665796.0	2.146.375,00
2017	10,91	649597.0	2.323.450,94
2018	10,95	644868.7	2.525.823,52
2019	10,53	666402.8	2.728.647,15
2020	10,31	689931.2	2.960.855,02
2021	10,40	695965.2	2.960.855,02
2022	9,95	695965.2	2.986.863,49
2023	9,72	781068.2	3.248.333,52
2024	9,62	810660.1	3.360.920,76

Sumber: BPS Rokan Hulu, Publikasi 2016-2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 terlihat perkembangan kemiskinan, produksi kelapa sawit rakyat, dan UMK di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2015–2024 yang menunjukkan bahwa meskipun kedua variabel tersebut menunjukkan tren kenaikan, penurunan angka kemiskinan berlangsung lebih lambat dan bahkan berfluktuasi, hanya sebesar 1,43 poin persentase (dari 11,05% menjadi 9,62%).

Secara teoritis, dalam teori pembangunan ekonomi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, dan efek berganda dalam ekonomi lokal (Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks Kabupaten Rokan Hulu, peningkatan produksi kelapa sawit rakyat secara teoritis diharapkan dapat mengikuti mekanisme serupa melalui pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, dan efek berganda dalam ekonomi lokal. Demikian

pula, Kebijakan upah minimum dirancang dengan tujuan untuk melindungi daya beli dan meningkatkan pendapatan pekerja berpenghasilan rendah, yang diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan (Mankiw, 2021). Di Indonesia, penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan implementasi kebijakan dengan tujuan memberikan perlindungan ekonomi bagi kelompok rentan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja formal (Bhayangkara, 2024). Namun, data empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan fakta di lapangan. Fluktuasi angka kemiskinan yang terjadi di tengah tren kenaikan produksi dan UMK menuntut adanya analisis mendalam mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan masing-masing variabel dari tahun ke tahun, sebelum melangkah pada pengujian signifikansi pengaruhnya.

Penelitian ini menjadi penting karena Kabupaten Rokan Hulu memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor kelapa sawit, yang berkontribusi sekitar 95,94% terhadap total produksi perkebunan. Ketergantungan ini membuat perekonomian daerah rentan terhadap berbagai guncangan eksternal, seperti fluktuasi harga CPO di pasar global dan tuntutan keberlanjutan dari negara-negara importir. Di sisi lain, reformasi sistem pengupahan nasional dan perdebatan mengenai efektivitas kebijakan upah minimum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin memperkuat kebutuhan untuk memahami bagaimana perubahan di sektor produksi dan kebijakan upah berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis perkembangan serta membuktikan secara empiris pengaruh antara variabel-variabel tersebut di Rokan Hulu melalui penelitian berjudul: “Pengaruh Produksi

Kelapa Sawit Rakyat dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Periode 2015–2024.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi perkembangan dan laju pertumbuhan Produksi Kelapa Sawit Rakyat, Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2015–2024?
2. Bagaimana pengaruh Produksi Kelapa Sawit Rakyat dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu, baik secara parsial maupun simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis deskripsi perkembangan dan laju pertumbuhan Produksi Kelapa Sawit Rakyat, Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2015–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh Produksi Kelapa Sawit Rakyat dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu, baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga penelitian ini tetap fokus, terarah, dan mendalam sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, peneliti menetapkan batasan-batasan masalah. Batasan ini berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup penelitian,

memastikan analisis dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, serta menghindari pembahasan yang terlalu luas sehingga mengurangi ketajaman analisis. Adapun batasan-batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan Variabel

Penelitian ini dibatasi pada analisis perkembangan dan pengaruh dua variabel independen, yaitu Produksi Kelapa Sawit Rakyat (X_1) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (X_2), terhadap satu variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (Y). Meskipun terdapat faktor lain yang secara teoretis dapat memengaruhi kemiskinan seperti tingkat inflasi, tingkat pendidikan, belanja pemerintah untuk sektor sosial, atau tingkat pengangguran terbuka variabel-variabel tersebut tidak dimasukkan dalam model. Keputusan ini diambil untuk menjaga kesederhanaan model dan fokus pada perbandingan pengaruh antara sektor ekonomi andalan daerah dengan instrumen kebijakan upah, yang menjadi inti permasalahan penelitian.

2. Batasan Objek dan Ruang Lingkup

Data yang digunakan adalah data makro/agregat pada tingkat kabupaten. Analisis dilakukan terhadap total produksi kelapa sawit rakyat, nilai UMK, dan persentase kemiskinan secara keseluruhan, bukan terhadap data mikro seperti pendapatan per petani atau pengeluaran per rumah tangga. Selain itu, variabel produksi kelapa sawit dibatasi hanya pada perkebunan rakyat, tidak mencakup produksi dari perkebunan besar milik negara (PTPN) atau perkebunan besar swasta (PBS). Pertimbangan ini diambil karena dampak ekonomi dari perkebunan rakyat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal.

3. Batasan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini membuat hasil penelitian mencerminkan karakteristik ekonomi, sosial, dan kebijakan yang spesifik pada daerah tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan secara langsung untuk daerah lain yang memiliki struktur ekonomi dan demografi berbeda.

4. Batasan Waktu Penelitian

Data yang dianalisis adalah data runtut waktu (*time series*) tahunan selama 10 tahun, yaitu periode 2015–2024. Rentang waktu ini dipilih karena dinilai cukup untuk melihat tren jangka menengah. Perubahan kondisi ekonomi, sosial, atau kebijakan di luar periode tersebut tidak termasuk dalam pembahasan.

5. Batasan Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan mencakup analisis deskriptif untuk melihat tren perkembangan data dan analisis regresi linear berganda untuk mengukur signifikansi pengaruh antar variabel. Metode statistik lain yang lebih kompleks, seperti analisis jalur (*path analysis*), analisis data panel, atau pendekatan kualitatif, tidak digunakan karena analisis deskriptif dan regresi linear berganda dianggap paling sesuai dan memadai untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi regional dan ekonomi pembangunan, dengan fokus pada faktor-faktor determinan kemiskinan di daerah berbasis perkebunan.
2. Menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji hubungan antara produksi sektor pertanian rakyat, kebijakan pengupahan, dan dinamika kemiskinan di wilayah setingkat kabupaten.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pendekatan ekonomi sektoral dan kebijakan upah minimum.
2. Menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan penetapan UMK dan program pemberdayaan masyarakat, khususnya petani kelapa sawit rakyat, dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan oleh Barus dan Ahsan (2025) dengan judul "Hubungan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pengentasan Kemiskinan Melalui Penciptaan Lapangan Kerja: Studi Kasus Empat Kabupaten di Riau". Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh usaha perkebunan kelapa sawit terhadap pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Riau, dengan fokus spesifik pada empat kabupaten penghasil terbesar, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, dan Pelalawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif menggunakan teknik analisis regresi data panel (*Pooled Least Square*) dengan variabel independen meliputi luas lahan, volume produksi, dan PDRB, serta variabel dependen tingkat kemiskinan dan serapan tenaga kerja. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan produksi sawit secara signifikan mampu menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan tambahan. Secara rinci, hasil estimasi menemukan bahwa setiap peningkatan volume produksi sebesar seribu ton dapat mengurangi kemiskinan sebanyak 332 jiwa. Selain itu, ditemukan juga bahwa PDRB berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun variabel luas lahan justru menunjukkan hubungan positif dengan kemiskinan, mengindikasikan bahwa perluasan lahan tanpa produktivitas tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan.

Penelitian ini dilakukan oleh Bintariningtyas dan Juwita (2021) dengan judul "Perkebunan kelapa sawit dalam pengentasan kemiskinan di provinsi Kalimantan Tengah". Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara luas lahan, jumlah hasil produksi dari kelapa sawit, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang diterapkan adalah analisis kuantitatif menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* yang mengolah data sekunder statistik dari tahun 2013 hingga 2018. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa variabel luas lahan perkebunan kelapa sawit berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang disebabkan karena sebagian besar lahan dikuasai oleh perusahaan swasta besar (PBS) dan bukan perkebunan rakyat. Selain itu, variabel jumlah hasil produksi kelapa sawit memiliki hubungan negatif namun juga tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti tingginya produksi dapat menurunkan kemiskinan namun pengaruh statistiknya lemah. Temuan yang paling signifikan adalah variabel PDRB yang memiliki hubungan negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan faktor yang paling nyata dalam menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah.

Penelitian ini dilakukan oleh Setiawan *et al.* (2025) dengan judul "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Lima Kabupaten Di Provinsi Riau" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)*, Volume 5, Nomor 1. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan upah minimum

terhadap tingkat kemiskinan di lima kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Riau, yaitu Rokan Hulu, Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder tahunan dari 2013 hingga 2022 dengan teknik analisis regresi data panel yang menggunakan model *Common Effect* sebagai model estimasi terbaik. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan upah minimum, semuanya memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kecenderungan penurunan kemiskinan seiring perbaikan variabel-variabel tersebut, pengaruhnya secara statistik belum cukup kuat atau optimal dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat di atas garis kemiskinan pada wilayah studi tersebut.

Penelitian ini dilakukan oleh Alliyah *et al.* (2024) dengan judul "Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Periode 2005-2022" yang dipublikasikan dalam jurnal *Sosio e-Kons*, Volume 16, Nomor 3. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh upah minimum dan tingkat pengangguran, baik secara parsial maupun simultan, terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda yang mengolah data sekunder berupa data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2005 hingga 2022 menggunakan alat bantu SPSS versi 24.00. Hasil utama penelitian menyimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel upah minimum dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan kontribusi

pengaruh (determinasi) sebesar 80,20%. Secara rinci, ditemukan bahwa setiap kenaikan 1% upah minimum mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 65,7%, sedangkan kenaikan 1% tingkat pengangguran akan meningkatkan kemiskinan sebesar 32,8%. Meskipun secara matematis menunjukkan pengaruh penurunan, kesimpulan statistik parsial peneliti menyatakan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan oleh Putria dan Putri, (2021) dengan judul "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia" yang dipublikasikan dalam *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 10, Nomor 2. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan, serta pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif menggunakan data sekunder panel yang mencakup 33 provinsi di Indonesia selama periode 2010-2019, yang kemudian diolah menggunakan regresi data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model*. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa pendidikan (diukur dari rata-rata lama sekolah) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan pendidikan secara nyata dapat menurunkan angka kemiskinan. Sebaliknya, upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka ditemukan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa kenaikan upah dan pengangguran dalam periode tersebut tidak serta merta memperburuk atau

memperbaiki kemiskinan secara statistik nyata. Selain itu, pengeluaran pemerintah pada sektor perlindungan sosial berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang diduga karena ketidaktepatan sasaran program bantuan. Secara simultan, seluruh variabel independen tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, terlihat adanya celah penelitian (*research gap*) berupa ketidakselarasan hasil temuan terdahulu mengenai pengaruh produksi kelapa sawit dan upah minimum terhadap kemiskinan. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan dengan cakupan wilayah yang luas (multi-kabupaten atau provinsi), sehingga belum ada kajian yang secara khusus menganalisis hubungan kedua variabel tersebut terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan data time-series terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara simultan pengaruh produksi kelapa sawit rakyat dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kemiskinan

2.2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan dalam mengakses kebutuhan dasar, pelayanan publik, serta kesempatan untuk hidup layak (Sumargo & Simanjuntak, 2019).

Menurut World Bank, (2025), kemiskinan didefinisikan sebagai “perampasan kesejahteraan” (*deprivation in well-being*), yang mencakup berbagai aspek, seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan akses terhadap barang dan jasa dasar, kualitas kesehatan dan pendidikan yang buruk, serta keterbatasan dalam partisipasi sosial dan pengambilan keputusan.

Sementara itu, (BPS, 2011) mendefinisikan kemiskinan melalui pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non-makanan. Dalam pendekatan ini, seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Garis kemiskinan ini terdiri atas dua komponen utama, yakni garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan.

Lebih lanjut, Todaro & Smith (2020) menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan pendapatan, melainkan juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pilihan hidup. Kemiskinan dalam pandangan ini mencerminkan ketidakmampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.

Pendekatan yang lebih filosofis dikemukakan oleh Sen (1999) melalui *capability approach*, di mana kemiskinan dipandang sebagai kegagalan individu dalam mencapai kapabilitas dasar yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang dianggap bernilai dalam masyarakat. Artinya, seseorang dikatakan miskin apabila ia tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi fungsi-fungsi dasar, seperti memperoleh pendidikan, menjaga kesehatan, dan menikmati standar hidup yang layak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan bukan sekadar kondisi ekonomi, melainkan situasi kompleks yang mencerminkan keterbatasan dalam berbagai dimensi kehidupan. Pemahaman multidimensional terhadap kemiskinan menjadi penting untuk menilai apakah produksi kelapa sawit rakyat dan UMK sebagai instrumen ekonomi berkorelasi dengan penurunan kemiskinan di Rokan Hulu.

2.2.1.2 Indikator dan Pengukuran Kemiskinan

Dalam konteks pengukuran kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan mengacu pada konsep Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan ini merupakan batas minimum pengeluaran yang harus dipenuhi seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dari segi makanan maupun non-makanan (BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2022).

Secara umum, Garis Kemiskinan terdiri atas dua komponen utama, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan menggambarkan nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kebutuhan ini dihitung berdasarkan konsumsi sejumlah komoditas makanan pokok yang umum dikonsumsi masyarakat, yang dalam praktiknya diwakili oleh sekitar 52 jenis komoditas (BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2022).

Sementara itu, Garis Kemiskinan Non-Makanan mencakup kebutuhan dasar di luar makanan, seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Komponen ini dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran rumah

tangga miskin terhadap sejumlah komoditas non-makanan yang relevan, yaitu sekitar 51 jenis komoditas di wilayah perkotaan dan 47 jenis di wilayah perdesaan (BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2022).

Seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah total nilai Garis Kemiskinan. Dengan demikian, ukuran kemiskinan tidak hanya didasarkan pada pendapatan, tetapi lebih kepada kemampuan riil individu atau rumah tangga dalam memenuhi pengeluaran minimum untuk hidup layak (BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2022).

Selain indikator utama berupa persentase penduduk miskin (P0), BPS juga menggunakan dua indikator tambahan untuk mengukur kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur rata-rata selisih antara pengeluaran penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, maka semakin dalam tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin karena pengeluaran mereka semakin jauh dari garis batas minimum (BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2022).

Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Nilai P2 yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran dalam kelompok miskin semakin besar, artinya terdapat perbedaan yang cukup ekstrem antara individu miskin yang paling parah kondisinya dengan yang lainnya (BPS Kabupaten Ogan Ilir, 2022).

Penggunaan ketiga indikator tersebut secara bersamaan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang tingkat kemiskinan di suatu wilayah, baik dari

segi jumlah, kedalaman, maupun distribusinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap indikator-indikator ini sangat penting dalam menganalisis efektivitas kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, khususnya dalam konteks hubungan antara variabel produksi kelapa sawit rakyat, UMK, dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.

2.2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut Kuncoro (2013), penyebab kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari sisi individu semata, tetapi juga melibatkan kondisi struktural dan geografis yang membentuk suatu lingkungan sosial-ekonomi tertentu.

1. Faktor individu

kemiskinan dapat terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang, sehingga menghambat akses mereka ke pekerjaan yang layak dan produktif. Selain itu, kondisi kesehatan yang buruk dan keterbatasan aset atau modal juga menjadi penghambat bagi individu dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitasnya.

2. Faktor struktural

Faktor ini turut berperan signifikan dalam menciptakan dan melanggengkan kemiskinan. Ketimpangan dalam struktur sosial dan ekonomi, seperti distribusi pendapatan yang tidak merata, terbatasnya lapangan kerja formal, serta minimnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merupakan beberapa penyebab utama dari kemiskinan struktural. Ketika sistem ekonomi tidak mampu menyediakan

kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, maka kelompok tertentu akan terus berada dalam kondisi miskin.

3. Faktor geografis

Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab penting kemiskinan, khususnya di wilayah-wilayah yang terisolasi secara fisik atau minim infrastruktur dasar. Wilayah yang sulit dijangkau atau tidak memiliki akses terhadap pasar, transportasi, dan teknologi akan menghadapi kesulitan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Hal ini membuat masyarakat di wilayah tersebut memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sehingga potensi kemiskinan menjadi lebih tinggi.

Dengan memahami berbagai penyebab kemiskinan ini, maka kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi individu, struktur sosial-ekonomi, serta karakteristik geografis daerah, termasuk dalam konteks Kabupaten Rokan Hulu.

2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang dipelopori oleh Adam Smith, menekankan bahwa pertumbuhan didorong oleh akumulasi modal, pembagian kerja (spesialisasi), dan kemajuan teknologi dalam kerangka sistem pasar bebas. Mekanisme transmisi dari pertumbuhan ekonomi ke pengurangan kemiskinan seringkali dijelaskan melalui konsep *trickle-down effect*. Menurut pandangan ini, manfaat dari pertumbuhan ekonomi pada awalnya akan dinikmati oleh pemilik modal dan tenaga kerja terampil. Seiring dengan ekspansi ekonomi, mereka akan meningkatkan investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi kelompok berpenghasilan

rendah, sehingga secara bertahap "menetes ke bawah" dan mengurangi kemiskinan (Todaro & Smith, 2020).

Namun, ketergantungan mutlak pada mekanisme *trickle-down* telah banyak dikritik. Bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu secara otomatis diiringi dengan penurunan kemiskinan yang signifikan, terutama jika pertumbuhan tersebut bersifat eksklusif dan memperlebar ketimpangan. Hal ini memunculkan konsep "pertumbuhan berkualitas" atau "pertumbuhan inklusif" (*pro-poor growth*), yang menekankan bahwa pola dan sumber pertumbuhan sama pentingnya dengan laju pertumbuhan itu sendiri (Todaro & Smith, 2020).

Pertumbuhan yang inklusif adalah pertumbuhan yang secara langsung melibatkan dan memberikan manfaat bagi kelompok miskin, misalnya melalui penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja tidak terampil. Todaro & Smith (2020) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan efektif dalam menurunkan kemiskinan jika disertai dengan kebijakan distribusi yang memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks Rokan Hulu, di mana PDRB sangat bergantung pada sektor kelapa sawit, pertanyaan krusialnya adalah apakah pertumbuhan di sektor ini bersifat inklusif dan mampu memberikan manfaat langsung bagi penduduk miskin.

2.2.3 Teori Pembangunan Regional

2.2.3.1 Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)

Dalam kajian pembangunan wilayah, François Perroux memperkenalkan konsep *growth pole* atau kutub pertumbuhan, yakni gagasan bahwa perkembangan

ekonomi suatu wilayah seringkali dipicu oleh adanya sektor atau industri unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain di sekitarnya (Kuncoro, 2013).

Dalam konteks Kabupaten Rokan Hulu, perkebunan kelapa sawit dapat dipandang sebagai salah satu kutub pertumbuhan karena kontribusinya yang dominan terhadap perekonomian daerah. Kehadiran sektor ini tidak hanya terkait dengan produksi tandan buah segar, tetapi juga membuka peluang bagi berkembangnya industri hilir seperti pengolahan minyak sawit, serta menciptakan kebutuhan akan input produksi dan jasa pendukung yang melibatkan banyak pihak.

2.2.3.2 Keterkaitan Ekonomi (*Linkage Effects*)

Pemikiran Albert Hirschman melalui konsep *linkage effect* memperkuat pandangan ini. Ia menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi sektor unggulan akan menimbulkan hubungan ke belakang (*backward linkage*) maupun ke depan (*forward linkage*) (Hirschman, 1958).

Pada perkebunan sawit, *backward linkage* tercermin dari kebutuhan petani terhadap pupuk, bibit, pestisida, dan sarana produksi lain yang menciptakan permintaan pada sektor penyedia input. Sementara itu, *forward linkage* tampak dari keberadaan pabrik pengolahan yang menyerap hasil panen untuk diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya. Hubungan timbal balik inilah yang secara teoretis diharapkan dapat memperkuat struktur perekonomian daerah sekaligus membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3.3 Mekanisme Distribusi Manfaat: *Trickle-Down* vs *Trickle-Up Effect*

Literatur pembangunan juga menyoroti bahwa keterkaitan ekonomi tersebut tidak selalu secara otomatis menurunkan angka kemiskinan. Michael Todaro dan Stephen Smith mengemukakan adanya perbedaan mekanisme distribusi manfaat pertumbuhan, yaitu melalui *trickle-down effect* dan *trickle-up effect* (Todaro & Smith, 2020).

Mekanisme *Trickle-Down Effect*

Mekanisme ini menekankan bahwa manfaat dari sektor unggulan, seperti kelapa sawit, akan menetes ke lapisan masyarakat luas melalui penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan pendapatan daerah. Perusahaan besar dan petani yang sukses akan meningkatkan investasi dan konsumsi, yang kemudian menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa dari pelaku ekonomi kecil.

Akan tetapi, dalam banyak kasus, manfaat ini tidak sepenuhnya terdistribusi merata, terutama bila keuntungan lebih banyak terakumulasi pada kelompok elit atau perusahaan besar. Efektivitas *trickle-down effect* sangat bergantung pada struktur kepemilikan, distribusi keuntungan dalam rantai nilai, dan tingkat intermediasi ekonomi. Dalam konteks perkebunan sawit rakyat, jika petani menghadapi kendala akses pasar, posisi tawar yang lemah terhadap pembeli, atau biaya input yang tinggi, maka peningkatan produksi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan bersih (Cramb & McCarthy, 2016).

Mekanisme *Trickle-Up Effect*

Sebaliknya, mekanisme *trickle-up* berangkat dari peningkatan kesejahteraan di lapisan bawah masyarakat, misalnya melalui peningkatan upah

atau pendapatan pekerja, yang pada gilirannya mendorong permintaan domestik serta memperkuat daya beli masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan upah minimum kabupaten (UMK) menjadi salah satu instrumen penting.

Peningkatan UMK secara teoritis dapat memberi dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan daya beli kelompok pekerja, yang kemudian menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa lokal. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain dan menciptakan lapangan kerja tambahan, meskipun juga menimbulkan konsekuensi terhadap biaya produksi dan dinamika pasar tenaga kerja (Munarni & wonua Nusantara, 2024).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, pemilihan variabel produksi kelapa sawit rakyat dan upah minimum kabupaten dalam penelitian ini berangkat dari relevansinya dengan dua jalur utama distribusi manfaat pembangunan, yakni *trickle-down* melalui pertumbuhan sektor unggulan dan *trickle-up* melalui peningkatan pendapatan pekerja. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah secara empiris sejauh mana kedua mekanisme tersebut berperan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.

2.2.4 Produksi Kelapa Sawit Rakyat dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan

2.2.4.1 Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, Todaro & Smith (2020) menekankan bahwa sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penghasil bahan pangan,

tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Pertanian merupakan sumber utama penyerapan tenaga kerja, penyedia bahan baku untuk industri, sumber devisa melalui ekspor, serta menciptakan permintaan domestik terhadap barang dan jasa industri.

Di wilayah pedesaan, sektor pertanian, termasuk sub-sektor perkebunan, sering kali menjadi tumpuan utama kehidupan ekonomi masyarakat. Ketergantungan terhadap sektor ini sangat tinggi, baik dalam hal pendapatan rumah tangga maupun penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor pertanian memiliki dampak langsung terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Ketika sektor pertanian berkembang secara produktif dan berkelanjutan, maka kesejahteraan masyarakat pedesaan pun cenderung meningkat. Sebaliknya, stagnasi atau penurunan produktivitas sektor ini dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi dan memperbesar angka kemiskinan (Syofya & Rahayu, 2018).

Dengan demikian, penguatan sektor pertanian menjadi komponen penting dalam strategi pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada pengurangan kemiskinan, terutama di daerah-daerah yang secara struktural bergantung pada kegiatan agraris seperti Kabupaten Rokan Hulu.

2.2.4.2 Jalur Kontribusi Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan dalam sektor perkebunan yang memainkan peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai salah satu komoditas strategis, kelapa sawit tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui ekspor,

tetapi juga menjadi sumber utama pendapatan bagi masyarakat pedesaan, khususnya petani rakyat (Putra & Sandria, 2022).

Berbagai studi telah mengidentifikasi tiga jalur utama di mana industri kelapa sawit dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengurangan kemiskinan:

1. Jalur Perkebunan (*On-Farm Employment*)

Jalur pertama adalah melalui perkebunan itu sendiri, yang menciptakan permintaan tenaga kerja dalam skala besar di daerah produsen, mulai dari kegiatan penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Produksi kelapa sawit yang dikelola oleh petani rakyat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, peningkatan produktivitas dan total produksi kelapa sawit diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan rumah tangga petani (Jamilah *et al.*, 2022)

2. Jalur Hilirisasi (*Forward Linkage*)

Jalur kedua adalah melalui kegiatan hilirisasi, di mana pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di sektor industri pengolahan. Kegiatan ini tidak hanya menyerap tenaga kerja langsung di pabrik, tetapi juga menciptakan permintaan pada sektor transportasi, perdagangan, dan jasa pendukung lainnya (Barus & Ahsan, 2025).

3. Jalur Konsumsi

Jalur ketiga adalah melalui jalur konsumsi, di mana produktivitas kelapa sawit yang tinggi menghasilkan minyak nabati dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal ini berkontribusi pada ketahanan pangan dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin (Barus & Ahsan, 2025).

Ketika pendapatan petani meningkat, daya beli mereka pun mengalami peningkatan, sehingga kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi secara lebih layak (Todaro & Smith, 2020).

Peningkatan pendapatan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Rumah tangga petani yang sebelumnya berada di bawah Garis Kemiskinan berpotensi untuk keluar dari kondisi tersebut seiring meningkatnya kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

2.2.4.3 Keterbatasan Transmisi Produksi terhadap Kesejahteraan

Meskipun secara teoritis peningkatan produksi seharusnya meningkatkan kesejahteraan, berbagai literatur menunjukkan bahwa hubungan ini tidak selalu linear. Rigg, (2006) menjelaskan bahwa dalam ekonomi komoditas, petani kecil sering menghadapi beberapa kendala struktural yang menghambat transmisi manfaat ekonomi.

1. Asimetri Informasi dan Posisi Tawar yang Lemah

Petani kecil seringkali menghadapi asimetri informasi dalam penetapan harga, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan pengolahan atau tengkulak. Keterbatasan akses informasi pasar dan minimnya kemampuan negosiasi menyebabkan petani menerima harga yang tidak optimal, meskipun volume produksi meningkat.

2. Biaya Produksi yang Meningkat

Seiring intensifikasi produksi, biaya input seperti pupuk, pestisida, dan tenaga kerja cenderung meningkat. Dalam beberapa kasus, peningkatan biaya ini dapat menggerus margin keuntungan petani, sehingga pendapatan bersih tidak meningkat secara proporsional dengan peningkatan output fisik.

3. Volatilitas Harga Global

Kelapa sawit merupakan komoditas yang diperdagangkan secara global dengan tingkat volatilitas harga yang tinggi. Fluktuasi harga CPO di pasar internasional sangat mempengaruhi harga TBS yang diterima petani. Kondisi ini membuat pendapatan petani tidak stabil, meskipun volume produksi terus meningkat.

4. Ketimpangan dalam Rantai Nilai

Cramb & McCarthy (2016) menjelaskan bahwa dalam rantai nilai kelapa sawit, nilai tambah terbesar terjadi di tahap pengolahan dan distribusi yang dikuasai oleh pelaku besar, bukan di tingkat petani. Ketimpangan ini menyebabkan petani rakyat hanya menerima sebagian kecil dari total nilai ekonomi yang dihasilkan oleh produk akhir.

5. Konflik Agraria dan Ketimpangan Kepemilikan

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang masif seringkali diiringi dengan isu-isu sosial yang kompleks. Konflik agraria akibat sengketa lahan, ketimpangan dalam penguasaan aset antara perusahaan besar dan petani kecil, serta isu deforestasi merupakan beberapa tantangan yang dapat, dalam beberapa kasus, justru memperburuk kondisi kelompok masyarakat rentan dan meminggirkan mereka dari manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Kondisi-kondisi ini menjelaskan mengapa peningkatan produksi fisik belum tentu diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan bersih yang signifikan bagi petani rakyat, sehingga dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas. Oleh karena itu, dampak netto dari industri kelapa sawit terhadap kemiskinan sangat bergantung pada model pengelolaan, struktur kepemilikan, dan kerangka kebijakan yang mengaturnya.

2.2.5 Teori Ekonomi Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah Minimum

2.2.5.1 Pengertian dan Tujuan Upah Minimum

Kebijakan Upah Minimum, atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tingkat daerah, merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam pasar tenaga kerja. Upah minimum merupakan standar upah terendah yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah dan wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai bagian dari perlindungan ketenagakerjaan. Kebijakan ini berfungsi sebagai salah satu instrumen jaring pengaman sosial untuk mencegah praktik pembayaran upah yang tidak layak serta menghindari eksploitasi tenaga kerja, khususnya bagi kelompok pekerja dengan keterampilan rendah (Mankiw, 2021).

Di Indonesia, kebijakan upah minimum diterapkan pada dua tingkatan, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan UMK dilakukan dengan ketentuan bahwa nilainya harus lebih tinggi daripada UMP, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di tingkat lokal (Bhayangkara, 2024).

Tujuan utama dari kebijakan upah minimum adalah untuk memastikan bahwa setiap pekerja memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), termasuk kebutuhan dasar seperti pangan,

sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjaga daya beli pekerja, tetapi juga turut meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga pekerja secara keseluruhan.

2.2.5.2 Teori Upah dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan

Dalam teori ekonomi, kebijakan upah minimum memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pengentasan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pendapatan dari sektor formal. Secara teoretis, hubungan antara upah minimum dan kemiskinan bersifat langsung. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) secara teoritis akan meningkatkan pendapatan nominal para pekerja, terutama mereka yang sebelumnya menerima upah mendekati atau di bawah Garis Kemiskinan. Dalam kondisi tersebut, kebijakan peningkatan upah minimum dapat menjadi instrumen penting yang membantu individu atau rumah tangga keluar dari kemiskinan (Putria & Putri, 2021).

Peningkatan UMK berdampak langsung pada pendapatan disposabel pekerja, yaitu pendapatan setelah pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi kebutuhan dasar maupun nondasar. Dengan meningkatnya daya beli, pekerja memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Perbaikan standar hidup ini kemudian berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh (Nurlinda & Saputri, 2023).

2.2.5.3 Perdebatan Teoritis: Dampak Upah Minimum terhadap Ketenagakerjaan

Dampak dari kebijakan upah minimum menjadi subjek perdebatan yang intens di kalangan ekonom. Teori ekonomi neoklasik standar berpendapat bahwa

penetapan upah minimum di atas tingkat upah *ekuilibrium* pasar akan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja. Perusahaan, dihadapkan pada biaya tenaga kerja yang lebih tinggi, akan merespons dengan mengurangi jumlah pekerja yang mereka rekrut, mengganti tenaga kerja dengan mesin (otomatisasi), atau bahkan mengurangi skala operasi. Akibatnya, meskipun pekerja yang tetap bekerja menikmati upah yang lebih tinggi, sebagian lainnya mungkin kehilangan pekerjaan, yang justru dapat meningkatkan angka pengangguran dan memperburuk kemiskinan (Mankiw, 2021).

Di sisi lain, teori efisiensi upah (*efficiency wage theory*) menawarkan perspektif yang berbeda. Teori ini berargumen bahwa membayar upah yang lebih tinggi (di atas tingkat kliring pasar) dapat menguntungkan perusahaan dengan cara meningkatkan produktivitas dan moral pekerja, mengurangi tingkat pergantian karyawan (*turnover*), dan menarik tenaga kerja yang lebih berkualitas. Dalam kerangka ini, kenaikan UMK tidak selalu berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja dan bahkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas (Akerlof, 1982).

2.2.5.4 Efek Pengganda (*Multiplier Effect*) Kebijakan Upah Minimum

Selain dampak langsung terhadap pekerja, kebijakan upah minimum juga memiliki potensi untuk menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian lokal. Ketika konsumsi rumah tangga meningkat akibat kenaikan pendapatan, permintaan terhadap barang dan jasa pun ikut naik. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain, menciptakan lapangan kerja tambahan, dan memperkuat aktivitas ekonomi secara umum (Rahmi & Riyanto, 2022).

Dalam konteks pengurangan kemiskinan, upah minimum tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan inklusif, terutama di wilayah-wilayah dengan struktur ketenagakerjaan yang didominasi oleh sektor formal berupah rendah.

2.2.5.5 Keterbatasan Cakupan UMK di Sektor Informal

Efektivitas UMK dalam menurunkan tingkat kemiskinan memiliki keterbatasan struktural yang penting untuk dipahami. Di daerah dengan dominasi sektor informal atau pertanian rakyat, cakupan UMK menjadi terbatas karena mayoritas petani sawit tidak termasuk dalam kategori pekerja berupah. Kebijakan ini lebih langsung menyentuh sektor pekerja formal dibandingkan pekerja informal atau petani mandiri (Rama, 2001).

Oleh karena itu, dampak langsung UMK lebih terasa pada pekerja pabrik pengolahan kelapa sawit dan sektor formal lainnya, sementara petani rakyat hanya merasakan dampak tidak langsung melalui peningkatan daya beli masyarakat secara umum atau penetapan acuan (*benchmark*) upah di sektor informal.

Besarnya kontribusi UMK terhadap pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada beberapa faktor kontekstual. Pertama, struktur pasar tenaga kerja di daerah menentukan sejauh mana penduduk bekerja di sektor formal atau informal. Kedua, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap penerapan UMK menjadi penentu apakah kebijakan tersebut efektif atau hanya sebatas regulasi normatif. Ketiga, dinamika ekonomi lokal, seperti harga komoditas unggulan (kelapa sawit), inflasi, serta kapasitas penyerapan tenaga kerja, turut memengaruhi efektivitas UMK dalam menekan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena

itu, UMK memang memiliki potensi signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, namun pengaruhnya tidak bersifat universal dan harus dianalisis sesuai dengan kondisi spesifik daerah yang bersangkutan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk menjawab dua tujuan utama. Pertama, dilakukan analisis deskriptif guna melihat gambaran historis, tren perkembangan, dan laju pertumbuhan Produksi Kelapa Sawit Rakyat, Upah Minimum Kabupaten (UMK), serta Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2015–2024. Analisis ini memberikan pemahaman awal mengenai fluktuasi data sebelum dilakukan pengujian statistik lebih lanjut.

Kedua, dilakukan analisis inferensial untuk membuktikan pengaruh antarvariabel. Kerangka pemikiran untuk analisis pengaruh ini dibangun di atas hubungan teoretis dan empiris yang telah diuraikan sebelumnya. Variabel independen, yaitu Produksi Kelapa Sawit Rakyat (X_1) dan Upah Minimum Kabupaten (X_2), diasumsikan memengaruhi variabel dependen, yaitu Tingkat Kemiskinan (Y), melalui jalur-jalur berikut:

1. Jalur Produksi Kelapa Sawit Rakyat (X_1) terhadap Kemiskinan (Y)

Peningkatan produksi kelapa sawit di Rokan Hulu diasumsikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama PDRB sektor pertanian. Pertumbuhan ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, baik secara langsung di perkebunan (*on-farm employment*) maupun tidak langsung di sektor pendukungnya (*off-farm employment*), seperti transportasi, perdagangan, dan industri pengolahan. Melalui mekanisme *backward linkage*, peningkatan produksi akan menciptakan permintaan terhadap input produksi

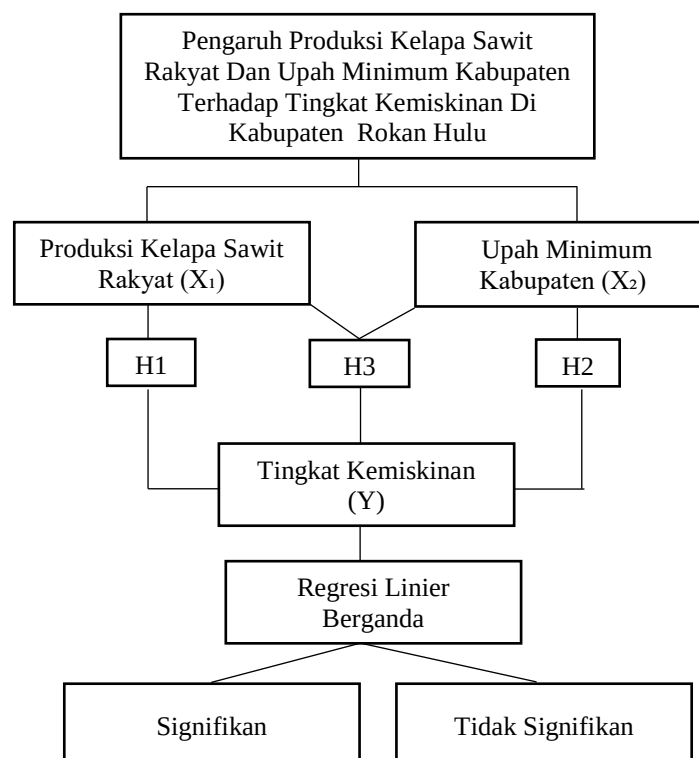
(pupuk, bibit, pestisida), sementara melalui *forward linkage*, akan tercipta nilai tambah di sektor pengolahan CPO. Terciptanya lapangan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, diharapkan terdapat hubungan negatif antara produksi kelapa sawit dan tingkat kemiskinan. Namun, efektivitas transmisi ini bergantung pada struktur kepemilikan, distribusi keuntungan dalam rantai nilai, dan posisi tawar petani dalam pasar.

2. Jalur Upah Minimum Kabupaten (X_2) terhadap Kemiskinan (Y)

Kenaikan UMK yang ditetapkan oleh pemerintah secara langsung meningkatkan tingkat pendapatan minimum yang diterima oleh pekerja di sektor formal. Bagi rumah tangga yang memiliki anggota keluarga bekerja di sektor formal dengan upah rendah, kenaikan UMK ini dapat menjadi pendorong signifikan untuk keluar dari jurang kemiskinan. Peningkatan pendapatan ini akan meningkatkan daya beli dan kemampuan untuk mengakses kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Melalui *multiplier effect*, peningkatan konsumsi rumah tangga akan mendorong permintaan terhadap barang dan jasa lokal, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja tambahan dan memperkuat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diharapkan terdapat hubungan negatif antara UMK dan tingkat kemiskinan. Namun, perlu dicatat bahwa dampak ini lebih kuat pada pekerja sektor formal, sementara petani rakyat di sektor informal hanya merasakan dampak tidak langsung.

3. Pengaruh Simultan

Secara simultan, kombinasi dari pertumbuhan sektor unggulan yang didorong oleh produksi kelapa sawit (*trickle-down effect*) dan kebijakan upah yang berpihak pada pekerja (*trickle-up effect*) diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih kuat dan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. Sinergi antara kebijakan sektoral, seperti peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat, dengan kebijakan makro, seperti penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK), dapat mempercepat pengurangan kemiskinan. Namun, keberhasilan sinergi ini sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut dijalankan di lapangan serta bagaimana kondisi perekonomian daerah mendukung, misalnya melalui peluang kerja yang memadai dan distribusi manfaat ekonomi yang merata.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah mengenai uji pengaruh (Rumusan Masalah ke-2), yaitu:

1. Hipotesis 1 (H_1): Produksi kelapa sawit rakyat diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Hipotesis 2 (H_2): Upah Minimum Kabupaten (UMK) diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.
3. Hipotesis 3 (H_3): Produksi kelapa sawit rakyat dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) diduga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan mempertimbangkan relevansi wilayah tersebut terhadap tujuan penelitian. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu sentra utama produksi kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji variabel produksi kelapa sawit (X_1). Selain itu, ketersediaan data yang lengkap dan berkesinambungan mengenai variabel tingkat kemiskinan (Y) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (X_2) di wilayah ini memungkinkan dilakukannya analisis data runtut waktu (*time series*) secara lebih mendalam.

Rentang waktu penelitian mencakup data tahunan selama sepuluh tahun, yaitu periode 2015–2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kurun waktu tersebut cukup representatif untuk menggambarkan tren, fluktuasi, dan potensi pengaruh dinamika ekonomi serta kebijakan yang berlaku terhadap variabel-variabel yang diteliti.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2019), data sekunder adalah sumber data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui pihak lain yang telah mengumpulkannya sebelumnya. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berbentuk runtut waktu (*time series*) tahunan, mencakup periode 2015 hingga 2024.

Seluruh data diperoleh dari publikasi resmi instansi pemerintah yang berwenang, sehingga terjamin keabsahan dan keakuratannya. Data tingkat kemiskinan (Y) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (X_2) diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu. Sementara itu, data produksi kelapa sawit rakyat (X_1) diperoleh dari publikasi BPS dan/atau Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau sumber tertulis lainnya.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengakses dan mempelajari dokumen-dokumen resmi yang telah diterbitkan oleh instansi terkait. Proses tersebut meliputi penelusuran data melalui situs resmi lembaga, mengunduh publikasi tahunan seperti Kabupaten Rokan Hulu dalam Angka, serta laporan statistik lainnya. Data yang relevan kemudian dikompilasi, ditabulasi, dan disiapkan untuk dianalisis lebih lanjut sesuai tujuan penelitian.

3.4 Metode Analiss Data

3.4.1 Analisis Deskriptif (Laju Pertumbuhan)

Analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengetahui perkembangan dan fluktuasi masing-masing variabel penelitian setiap tahunnya. Laju pertumbuhan dihitung menggunakan rumus berikut (Sukirno, 2016):

$$r = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100 \%$$

r : Laju pertumbuhan (%)

X_t : Data tahun tertentu (tahun t)

X_{t-1} : Data tahun sebelumnya

3.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis data merupakan tahapan sistematis yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data penelitian, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS), yang memungkinkan analisis data secara akurat dan efisien. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada panduan yang dijelaskan oleh (Ghozali, 2018).

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan dan mengukur besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Di mana:

Y = Tingkat Kemiskinan (%)

α = Konstanta (nilai Y ketika X_1 dan X_2 bernilai 0)

β_1, β_2 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

X_1 = Produksi Kelapa Sawit Rakyat (Ton)

X_2 = Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Rupiah)

e = *Error term* atau variabel pengganggu

Dengan menggunakan model ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap sejauh mana produksi kelapa sawit rakyat dan UMK mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi persyaratan asumsi klasik. Hal ini penting agar estimasi yang diperoleh *bersifat Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Oleh karena itu, dilakukan serangkaian pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual pada model regresi terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi residual mendekati normal. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji Shapiro-Wilk, yang direkomendasikan untuk jumlah sampel yang relatif kecil ($n < 50$). Apabila nilai signifikansi (Sig.) yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018).

3.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi yang sangat tinggi antar variabel independen. Keberadaan multikolinearitas dapat memengaruhi kestabilan koefisien regresi, sehingga model menjadi tidak reliabel. Deteksi multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dinyatakan bebas

dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2018).

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji kesamaan varians residual pada seluruh pengamatan. Model regresi yang baik seharusnya memiliki varians residual yang konstan (homoskedastik). Dalam penelitian ini, pendeteksian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Apabila nilai signifikansi (Sig.) masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3.5.4 Uji autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Masalah autokorelasi umumnya muncul pada data runtut waktu (*time series*) dan dapat menyebabkan estimasi menjadi bias. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson* (DW test), di mana nilai statistik DW akan dibandingkan dengan nilai kritis dL (batas bawah) dan dU (batas atas) pada tabel *Durbin-Watson* untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: Jika $DW < dL \Rightarrow$ terdapat autokorelasi positif. Jika $DW > 4 - dL \Rightarrow$ terdapat autokorelasi negatif. Jika $dL \leq DW \leq dU \Rightarrow$ keputusan tidak pasti (daerah inconclusive). Jika $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL \Rightarrow$ keputusan tidak pasti (daerah inconclusive). Jika $dU < DW < 4 - dU \Rightarrow$ tidak terdapat autokorelasi (Ghozali, 2018).

3.6 Uji Hipotesis

Setelah model regresi dinyatakan lolos dari seluruh uji asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan apakah koefisien regresi yang dihasilkan dari data sampel cukup signifikan secara statistik, sehingga temuan penelitian dapat digeneralisasikan pada tingkat populasi. Dengan kata lain, uji hipotesis berfungsi sebagai pembuktian empiris terhadap dugaan atau jawaban sementara yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial, atau Uji t, dilakukan untuk mengukur signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah, dengan asumsi variabel independen lainnya dalam model berada dalam kondisi konstan. Uji ini digunakan untuk menjawab hipotesis pertama (H_1) dan hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian. Hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

Untuk variabel Produksi Kelapa Sawit Rakyat (X_1)

1. $H_0: \beta_1 = 0 \rightarrow$ secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara produksi kelapa sawit rakyat terhadap tingkat kemiskinan.
2. $H_a: \beta_1 \neq 0 \rightarrow$ secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara produksi kelapa sawit rakyat terhadap tingkat kemiskinan.

Untuk variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) (X_2)

1. $H_0: \beta_2=0 \rightarrow$ secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara UMK terhadap tingkat kemiskinan.

2. $H_a: \beta_2 \neq 0 \rightarrow$ secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara UMK terhadap tingkat kemiskinan.

Kriteria pengambilan keputusan menggunakan perbandingan antara nilai signifikansi (p-value) dan tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan sebesar 0,05 (5%).

Apabila $p\text{-value} < 0,05 \rightarrow H_0$ ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Apabila $p\text{-value} \geq 0,05 \rightarrow H_0$ diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Signifikansi Simultan atau Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji ini juga berfungsi untuk menilai kelayakan model regresi secara keseluruhan (*goodness of fit*) dan akan digunakan untuk menjawab hipotesis ketiga (H_3). Hipotesis yang diuji:

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ Artinya, secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara produksi kelapa sawit rakyat dan upah minimum kabupaten (UMK) terhadap tingkat kemiskinan.
2. $H_a : \text{Minimal terdapat satu } \beta_i \neq 0$ Artinya, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara produksi kelapa sawit rakyat dan UMK terhadap tingkat kemiskinan.

Kriteria Pengambilan Keputusan: Jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi (Sig.) $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan berdasarkan hasil Analisis Varian (ANOVA) pada output regresi linier berganda.

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase dari total variasi dalam variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variasi dari variabel-variabel independen dalam model regresi. Nilai ini mengindikasikan seberapa baik model penelitian dalam menjelaskan fenomena yang diamati.

Dalam penelitian ini, akan digunakan nilai *Adjusted R Square*. Berbeda dengan *R Square* biasa, *Adjusted R Square* telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model, sehingga lebih akurat digunakan untuk regresi linear berganda. Nilai ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin nilai *Adjusted R Square* mendekati 1, maka semakin tinggi kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan semakin rendahnya kemampuan model tersebut (Ghozali, 2018).

3.7 Definisi Oprasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan penjelasan yang spesifik, terukur, dan konsisten mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

1. Tingkat Kemiskinan (Variabel Dependen / Y)

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel ini berperan sebagai variabel dependen (terikat) yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah Persentase Penduduk Miskin (P0) yang secara resmi dihitung dan dipublikasikan oleh BPS. Satuan pengukuran variabel ini adalah persen (%) per tahun.

2. Produksi Kelapa Sawit Rakyat (Variabel Independen / X_1)

Produksi kelapa sawit rakyat didefinisikan sebagai jumlah total hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit milik petani rakyat, bukan oleh perusahaan besar milik negara (PBN) maupun perusahaan besar swasta (PBS). Variabel ini merupakan variabel independen (bebas) pertama. Indikator yang digunakan adalah total produksi kelapa sawit rakyat per tahun. Satuan yang digunakan adalah ton, dengan data bersumber dari publikasi BPS Kabupaten Rokan Hulu.

3. Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Variabel Independen / X_2)

Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah standar upah minimum bulanan yang ditetapkan secara resmi melalui keputusan gubernur dan wajib

dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di sektor formal di Kabupaten Rokan Hulu. Variabel ini mencerminkan intervensi kebijakan pemerintah di pasar tenaga kerja dan berfungsi sebagai variabel independen (bebas) kedua. Indikator yang digunakan adalah besaran nominal UMK per tahun. Satuan pengukuran variabel ini adalah Rupiah (Rp), dengan data diperoleh dari publikasi BPS.